



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT JAWA

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Administrasi

- Batas Laut Teritorial
- + Batas Zona Tambahan

Batas Wilayah Perencanaan

- Garis Pantai
- Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Provinsi

- Batas Wilayah Provinsi
- Batas Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi

Batas Lain

- Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional

Alur Migrasi Biota Laut

- Alur Migrasi Penyu

Singkatan
P. = Pulau
Tg. = Tanjung

ARAHAN RENCANA POLA RUANG DI PERAIRAN PESISIR

Kawasan Budi Daya

- Kawasan Lindung
- Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan
- Indikasi Kawasan Konservasi di Laut

Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)

- Lokasi Indikatif KSNT terkait Daerah Cadangan Karbon Biru

Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*
- Peta Laut Indonesia Nomor 360 Tahun 2014, Peta Laut Indonesia Nomor 361A Tahun 2013, dan Peta Laut Indonesia 365 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL

RENCANA POLA RUANG LAUT DI PERAIRAN DI LUAR PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

- U1 Zona Pariwisata
- U5 Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- U6 Zona Pertambangan Mineral dan Batubara
- U8 Zona Perikanan Tangkap
- U9 Zona Perikanan Budi Daya
- U18 Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

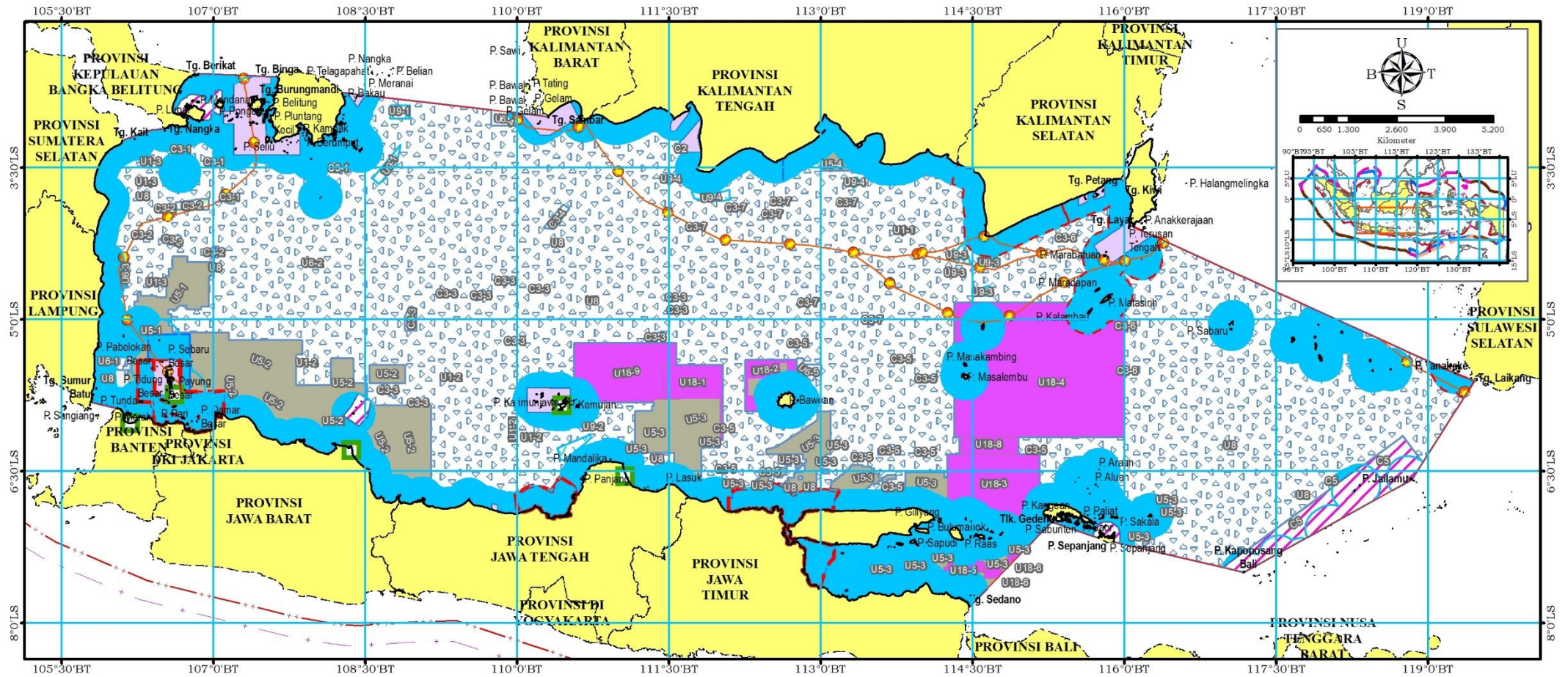
- C2 Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan
- C3 Indikasi Kawasan Konservasi Maritim
- C3 Indikasi Kawasan Konservasi di Laut

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

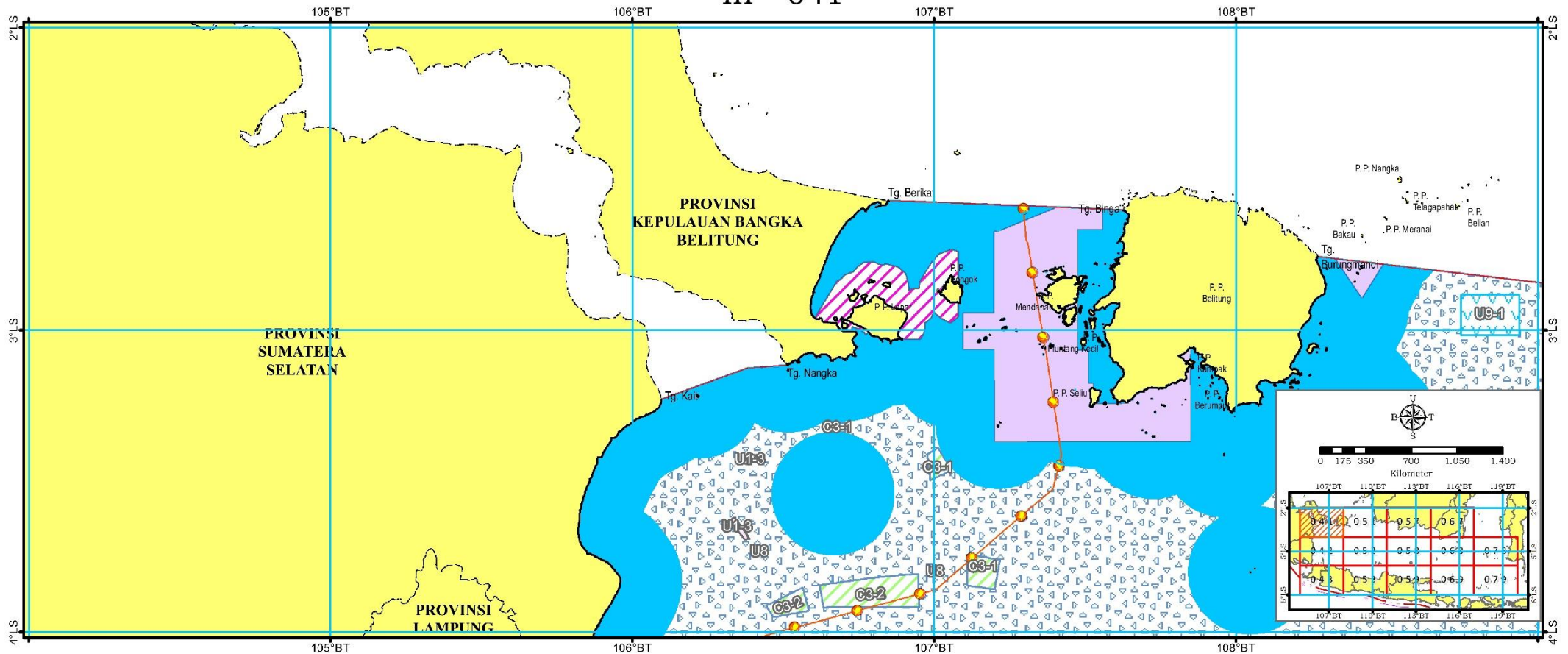
PETA INDEKS





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

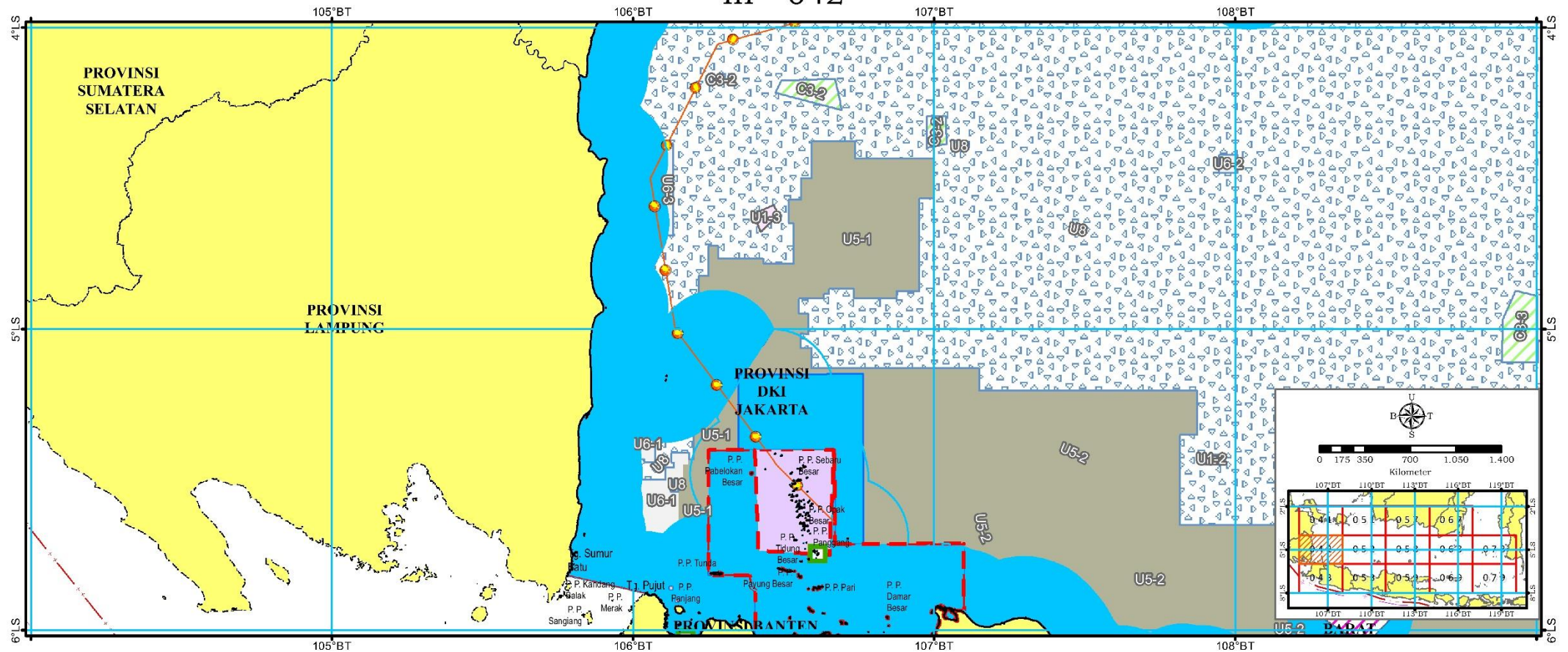
III - 041





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

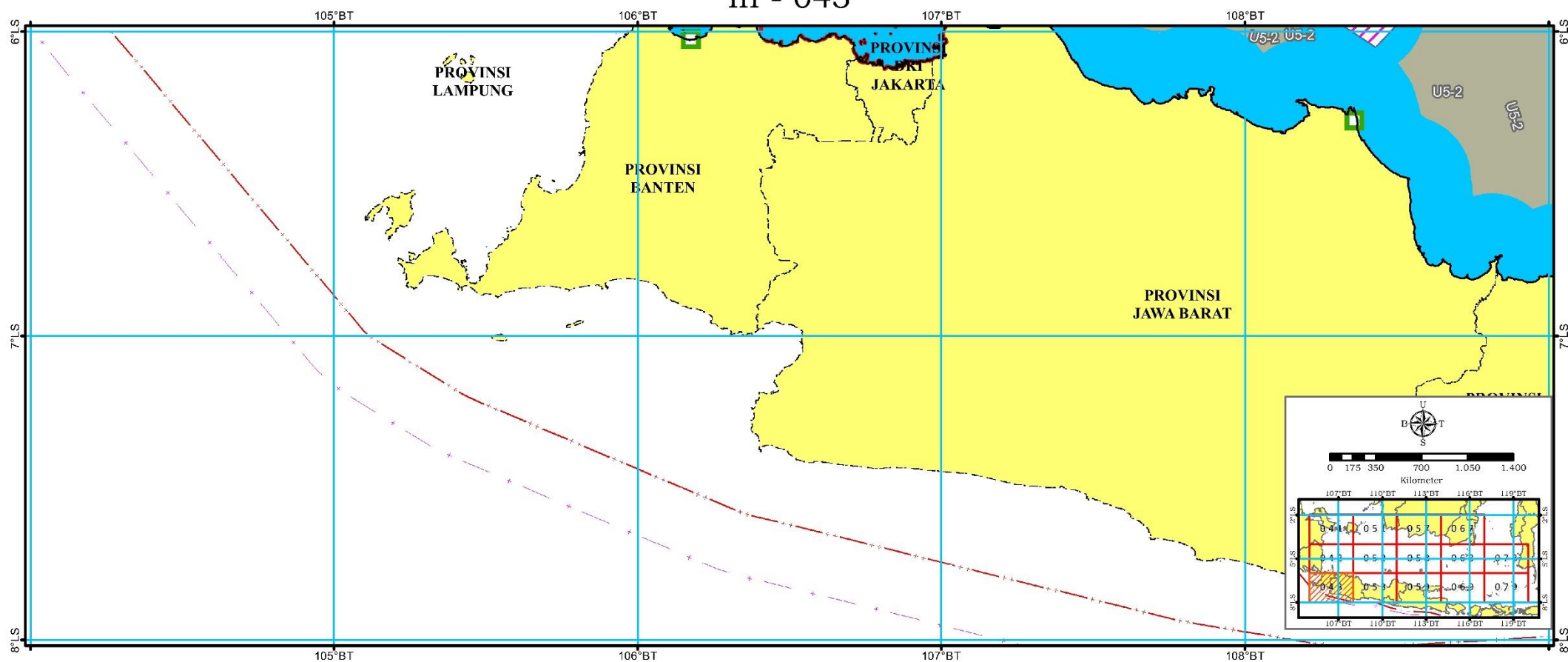
III - 042





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

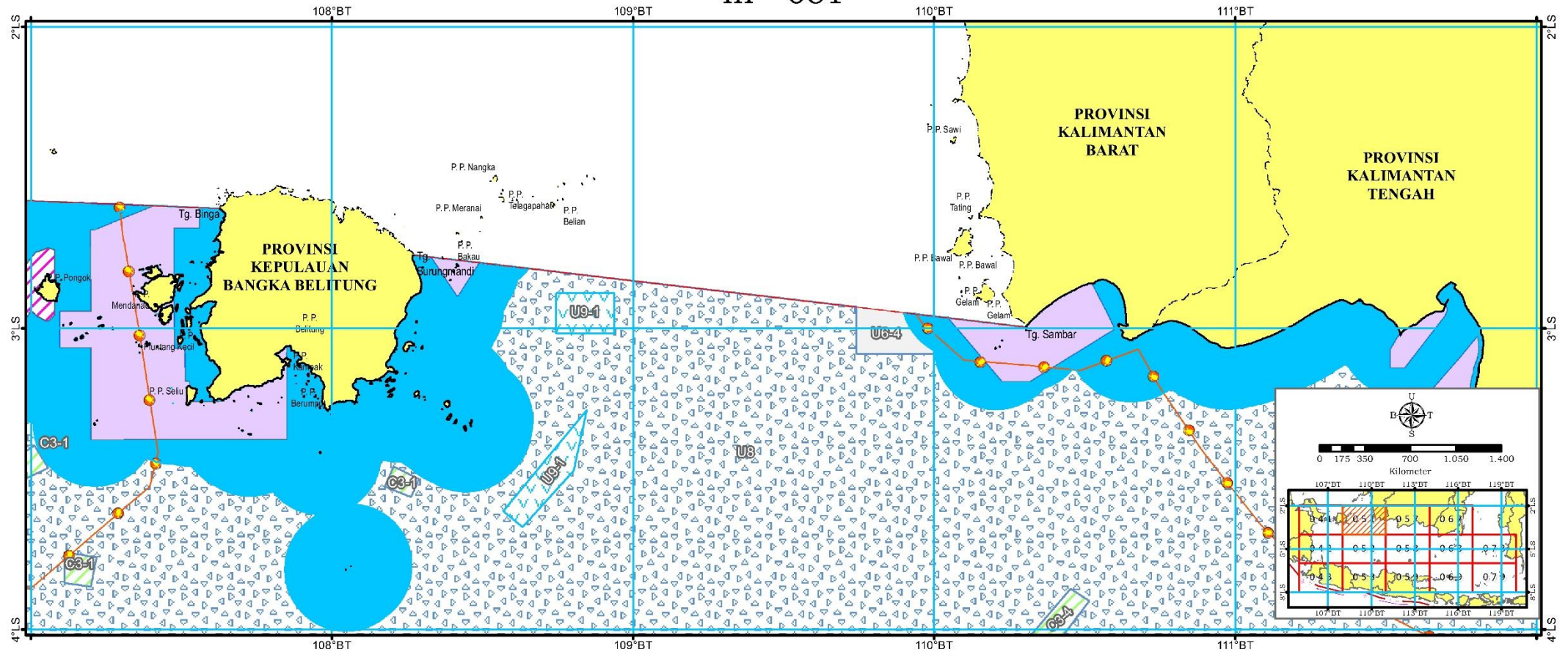
III - 043





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

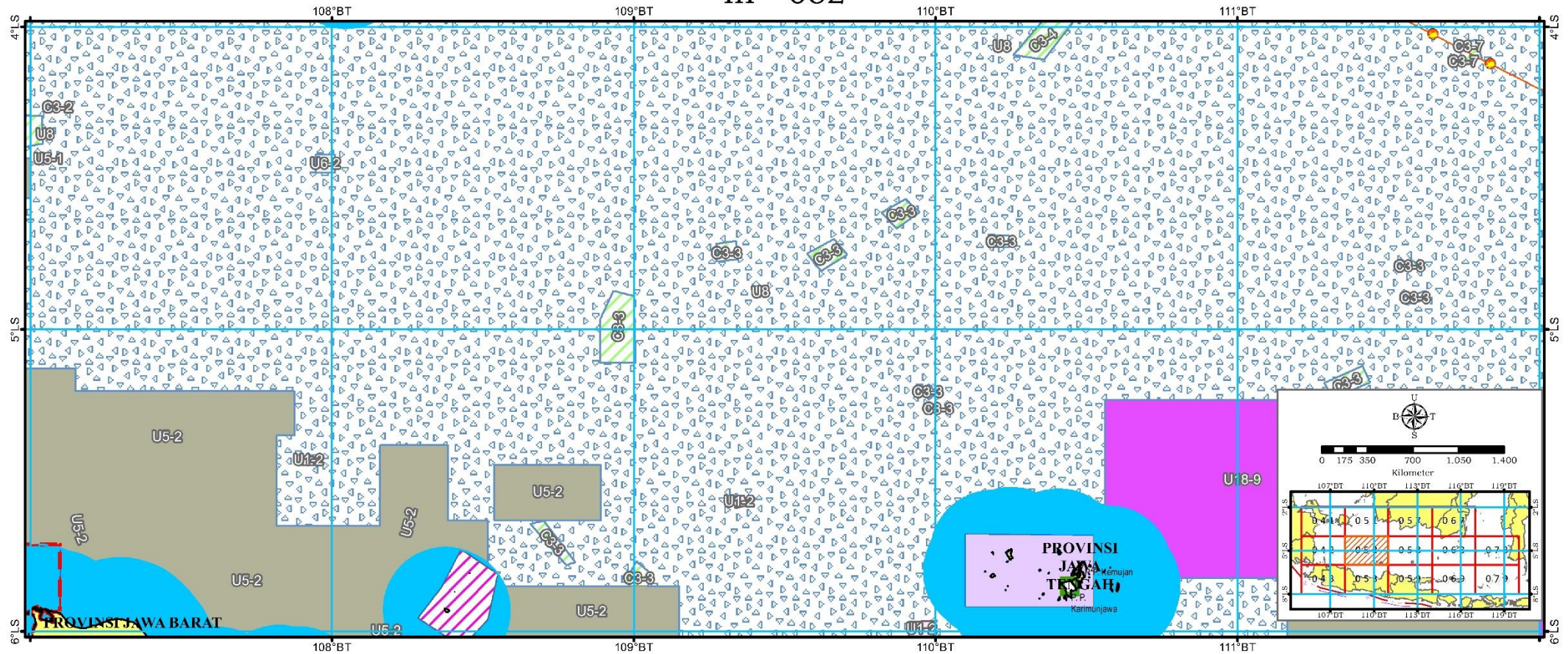
III - 051





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

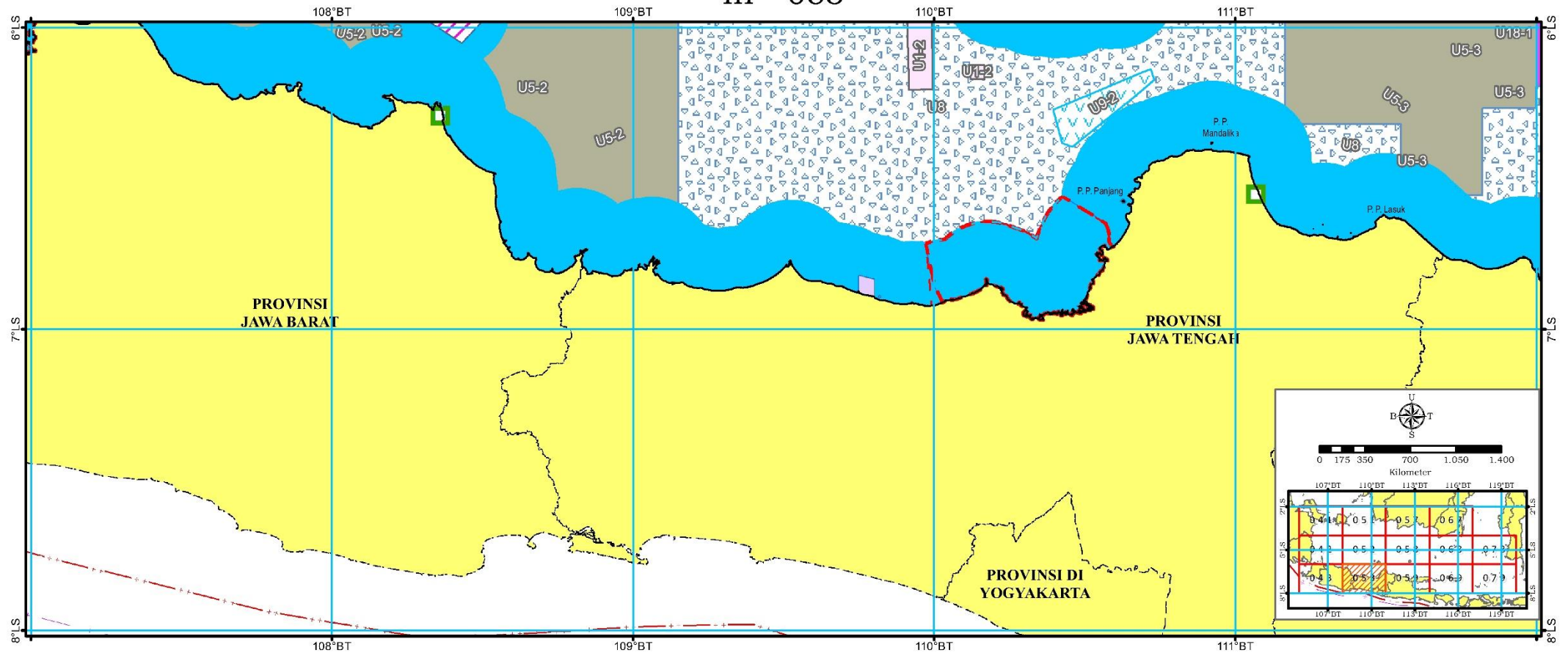
III - 052





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

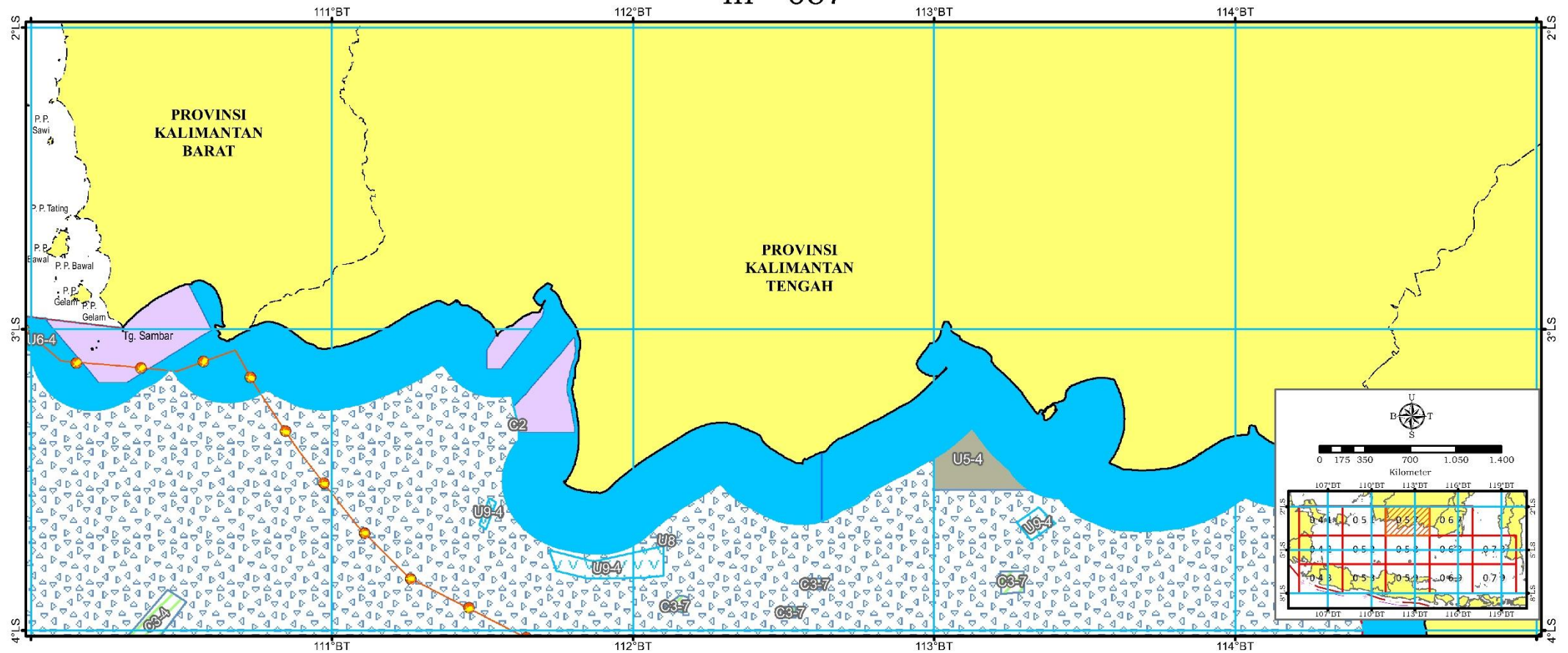
III - 053





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

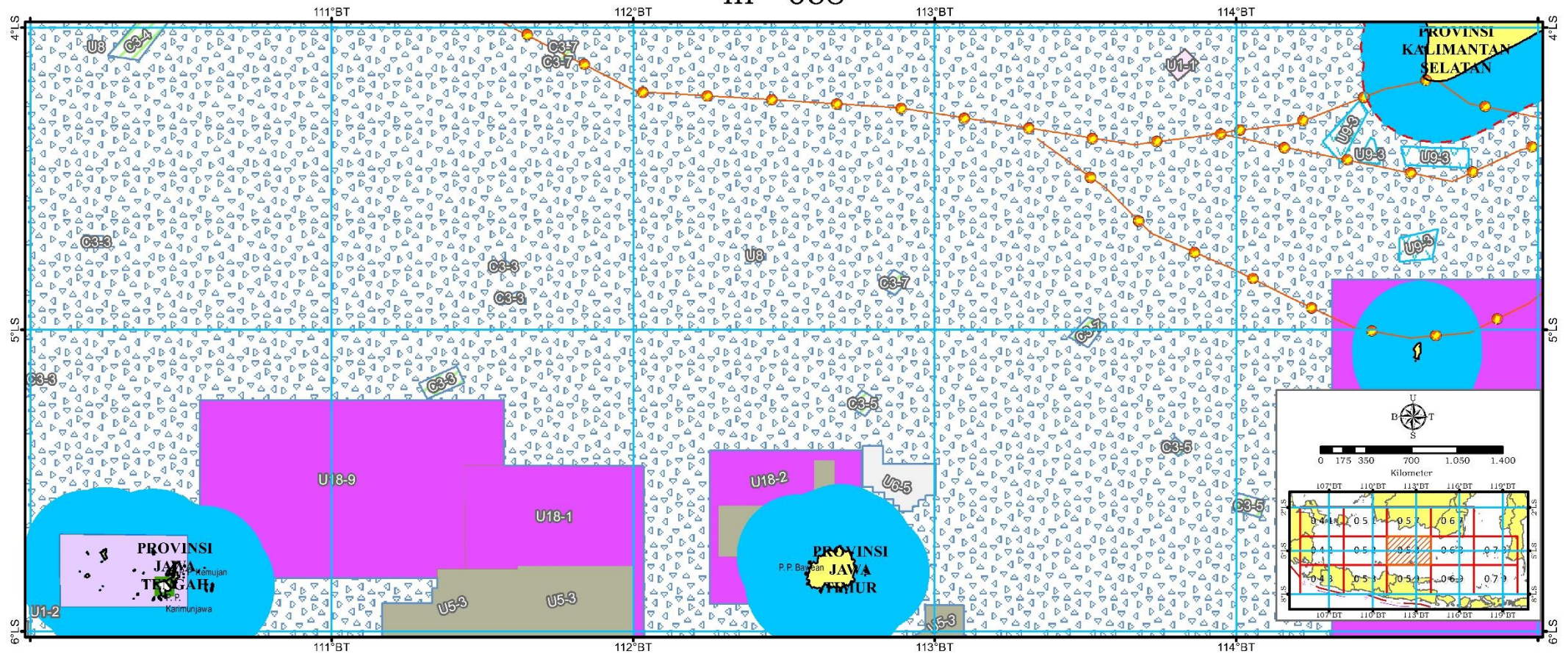
III - 057





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

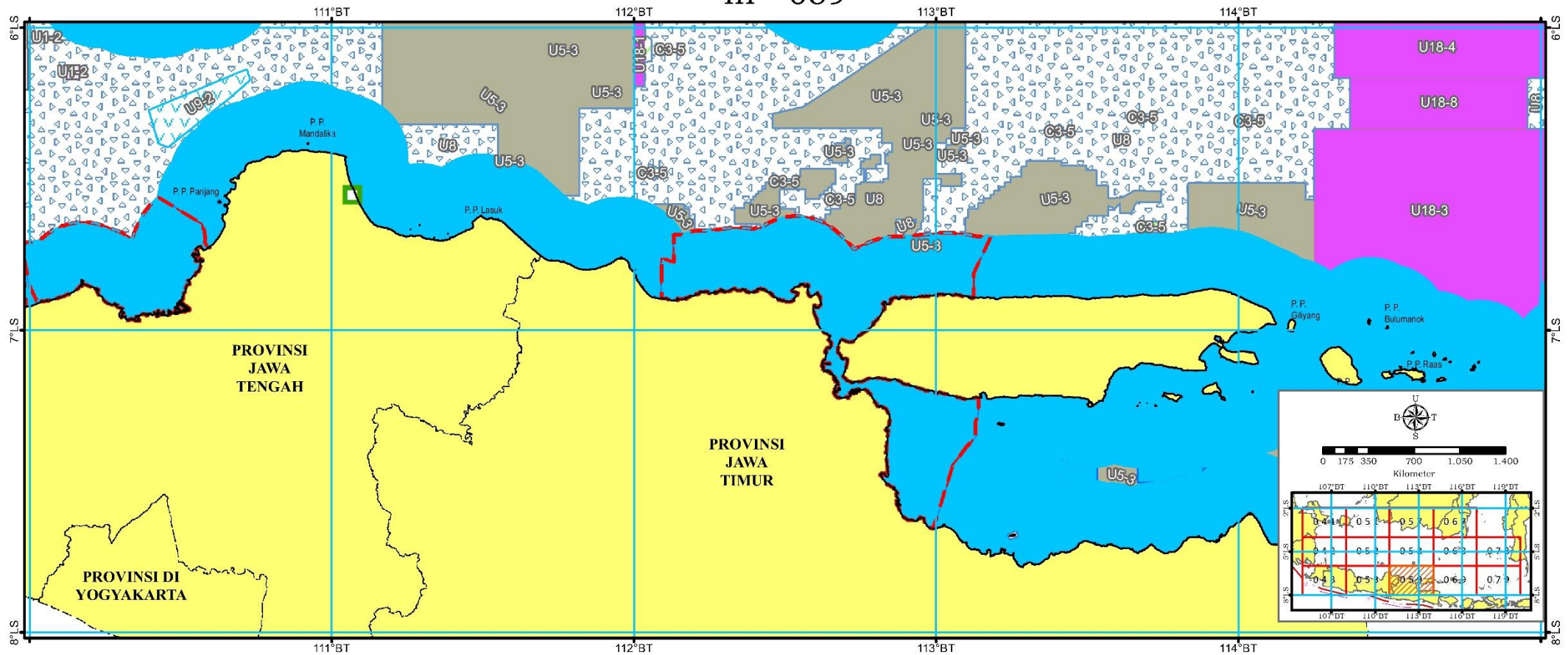
III - 058





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

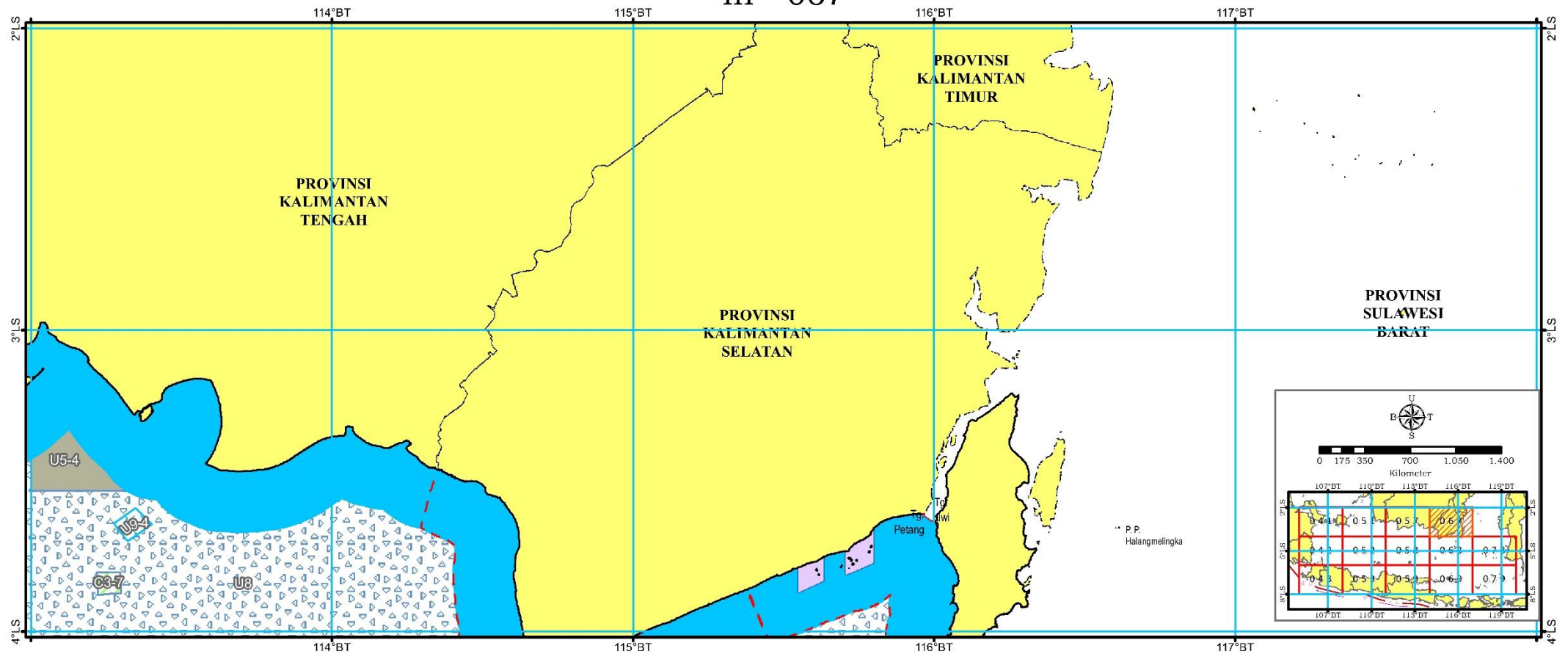
III - 059





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

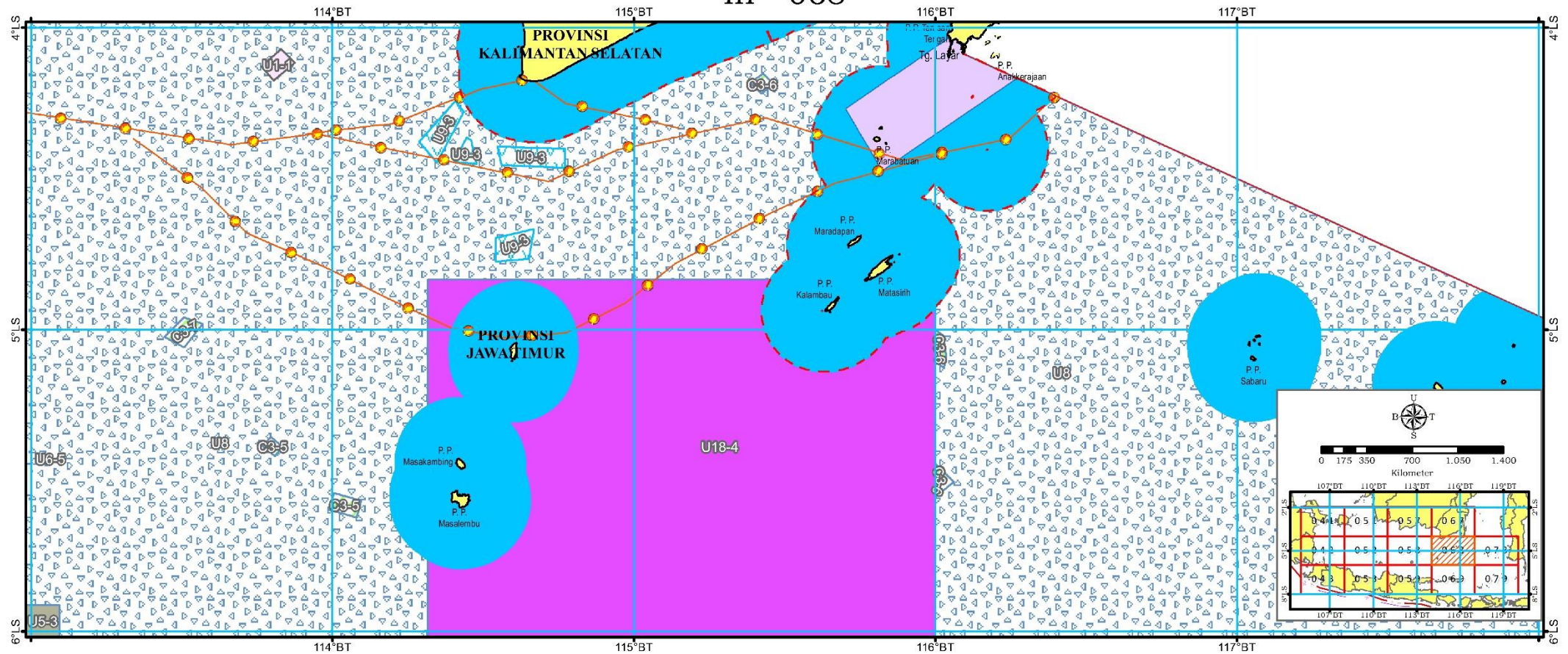
III - 067





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

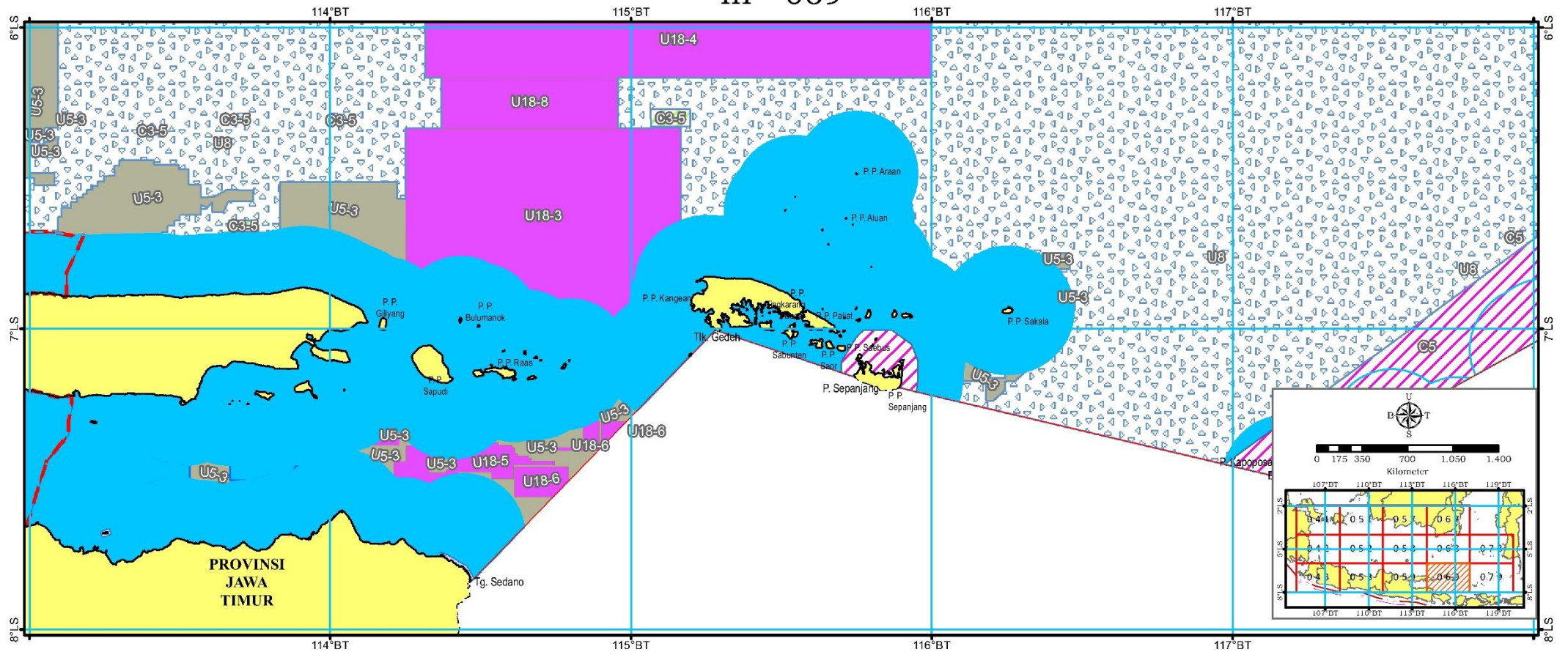
III - 068





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

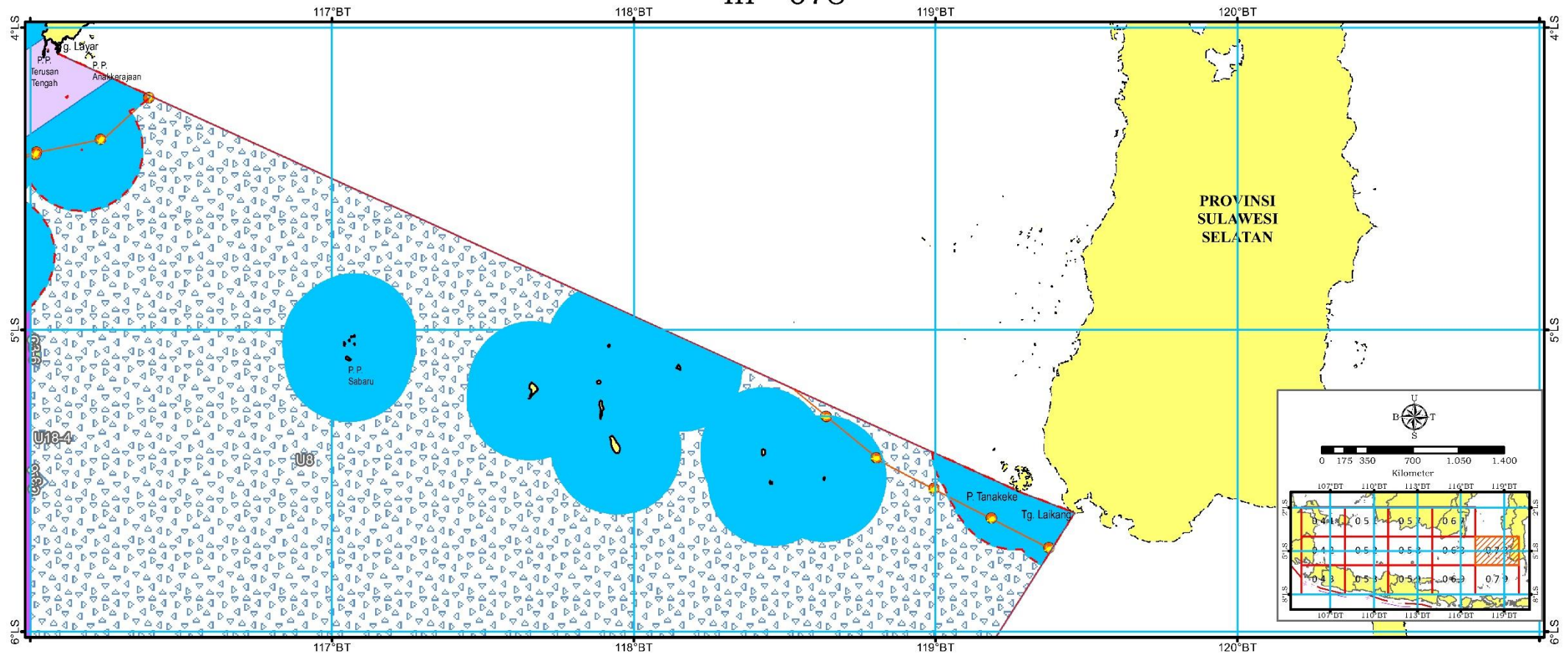
III - 069





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

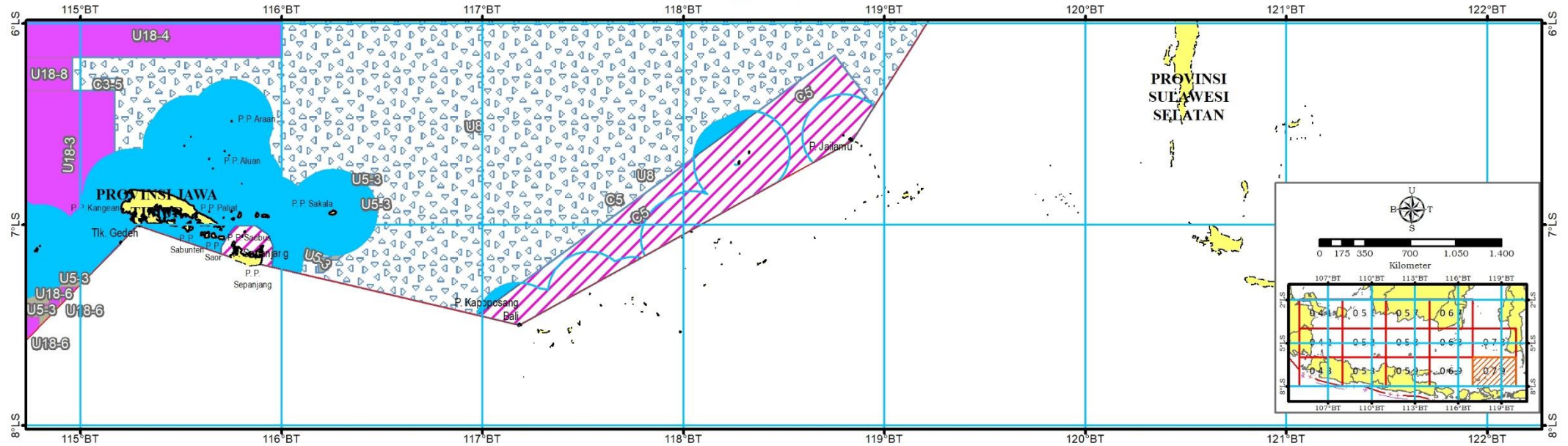
III - 078





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III - 079



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



Sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 068282 C